

pernah kita dengar cerita orang tua yang tidak mau memberi hak walinya lantaran si anak dianggap durhaka. Artinya pihak anak tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai anak (menghormati) kemudian orang tua menuntut atas haknya yang semestinya diterima.

Secara moral keagamaan, banyak pula cerita klasik maupun modern seperti cerita "Malin Kundang" dan sebagainya adalah bukti konkrit atas keberadaan orang tua yang seharusnya dihormati oleh anak-anaknya.

Demikian pula hak orang tua yang bersifat materi terhadap anak-anaknya menurut hukum Islam, hal ini dapat dipahami dari hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

انت ومالك لوالدك ان اولادك من اطيب كسبكم
فكلوا من كسب اولادكم (رواه ابو داود)

(Sunan Abu Dawud, juz II₁: 289.

Artinya :

" Kamu dan hartamu adalah untuk orang tuanya, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik pekerjaanmu, maka makanlah dari hasil pekerjaan anak-anakmu ". (HR Abu Dawud).

Maksud dari hadits tersebut adalah bukan berarti orang tua terhadap kekayaan anak-anaknya tapi dapat berarti bebas, tidak mencari perhatian melainkan dikehendaki dalam hal ini adalah orang tua berhak secara ma'ruf

terletak pada ibu semata hanya secara kebetulan orang yang mempunyai air susu untuk nafkah bayi dimana air susu ibu tersebut sangat baik untuk perkembangan bayinya, sehingga seolah-olah ayat tersebut dikhitabkan (ditujukan) kepada ibu. Akan tetapi dikehendaki adalah bapak selaku pemimpin rumah tangga, sebab apabila si ibu tidak keluar air susu dan menyewa orang lain untuk menyusuinya dan atau disambung dengan susu kaleng atau lainnya, maka tanggungan tersebut adalah kepada bapak.

Dari nash diatas juga dapat diambil pemahaman bahwa orang tua khususnya bapak selaku pemimpin dalam keluarga adalah berkewajiban dalam memberikan nafkah lahir kepada anak-anaknya, sebagaimana kewajiban bapak kepada ibu-ibu berupa makanan, pakaian, perumahan dan sejenis lainnya (Al Baqarah : 23). Sebab maksud rezki dalam ayat itu adalah makanan secukupnya, baju untuk penutup badan, perumahan, tentu saja dengan cara yang ma'ruf (baik). (fiqih Sunnah, juz II : 169)

Adapun tentang kewajiban berupa non materi, yakni berupa kasih sayang, pendidikan misalnya yang dapat dipahami dari nash Al Qur'an sebagaimana di dalam surat Al Kahfi : 46.

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصالحة

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَّا

Artinya :

" Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan ".
(OLP-6 RI, 1966 : 450)

Suatu sastra yang teramat indah dan tidak akan pernah tertandingi, setelah Allah menyebutkan " Anak-anakmu itu sebagai perhiasan di dunia", arti ayat tersebut bahwa anak-anak sebagai perhiasan di dunia dan harapan di akhirat yang kekal wajib diberi bekal berupa ilmu dunia dan ilmu akhirat, sebagaimana sabda Nabi kita SAW :

مَنْ أَرَادَ الرِّبَا فَعَلِيهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَاتِ
فَعَلِيهِ بِالْعِلْمِ (رواه البخاري)

(Subulussalam, juz I : 415)

Artinya :

" Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka untuknya harus dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka untuknya harus dengan ilmu ". (HR. Imam Buchari)

Suatu pendidikan akan dapat berhasil apabila dibarengi dengan kasih sayang dan saran-saran yang lainnya, maka kasih sayang beserta keseluruhannya adalah merupakan syarat yang wajib adanya :

kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Dalam hukum perdata kewajiban tersebut harus dipikul oleh ayah dan ibu selama masih dalam ikatan perkawinan sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : " Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebab sama-sama mengatur tentang kewajiban mendidik dan memelihara anak.

Dalam hukum Islam seorang ayah selama anak masih kecil berkewajiban memberi nafkah dan seorang ibu masih tetap juga memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dilukiskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 233 yang berbunyi :

والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم
الرضاعة وعلی الوالد له رزقهن وكسوتهن بالمهر

Artinya :

" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan berkewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (Al Qur'an, 1916 : 57).

Keterangan ayat tersebut diatas, menurut Ahmad Musthofa Al Maroghi, bahwa diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari dua tahun jika kedua orang tua memandang adanya kemashlahatan. Dan dalam hal ini persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua. (Ahmad Musthofa AL Maroghi, 185)

Memperhatikan keterangan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang mendidik anak dan memelihara anak adalah kedua orang tuanya. Sebab selama itu anak masih dalam kewajiban kedua orang tua untuk mengurus segala kebutuhan dan permasalahan baik terhadap pribadi maupun harta kekayaannya. Yang semua ini akan dimintakan pertanggung jawabannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ص . م
يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالأمام راع وهو مسئول عن
رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة
في بيت زوجها رعية وهو مسئول عن رعيتهما والحداد م
في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته (رواه البخاري)
(Shohih Bukhari, juz II : 59)

dapat penulis katakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hukum perdata itu tidaklah menyimpang dengan ketentuan Islam, sebab dalam hukum Islam juga mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak yang dalam hal ini menyangkut kewajiban memberi nafkah, melindungi, memelihara dan mendidiknya baik itu pada pribadi si anak maupun terhadap kekayaannya, itu semua dalam Islam adalah merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu, besok akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Oleh sebab itu selama anak ini masih kecil segala tindakan dan perbuatan adalah merupakan tanggung jawab orang tua, sebab anak yang masih kecil itu belum sempurna akalnya, sehingga tidak dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Sehubungan dengan itu dalam hukum perdata pada pasal 302 dikatakan " Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia atau atas permintaan dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau partikelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bilamana pemangku ini

pihak ibu tidak dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah :

وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا - وَإِنْ مَاتَ حَوْعًا - وَهِيَ فِي غَايَةِ الْفَنِيِّ

(Al Muhalla, juz XI : 343)

Artinya :

" Dan tidak bisa dipaksakan kepada seorang ibu untuk memberi nafkah kepada anaknya walaupun anak dalam keadaan mati kelaparan, sedangkan ibu dalam keadaan kaya-raya ".

Pendapat Ibnu Hazm seperti di atas adalah terlalu ideal dan saklek.

b. Memang benar bahwa pihak istri pada asalnya tidak terkena beban memberikan nafkah atas anak-anaknya, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan beban terhadapnya berdasarkan kemaslahatan.

Lantaran itu pula jumbuh Ulama' sependapat bahwa dalam situasi tertentu seperti diatas, pihak istripun dapat dikenakan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. (Abu Muhammad Ali bin Ahmad, 1970 : 343).

Selanjutnya apabila memang keberadaan orang tua benar-benar dalam keadaan tidak cakap atau tidak mampu, seperti dijelaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum perdata di atas, maka di dalam Al Qur'an memberi kelonggaran yang pada intinya bahwa pemberian nafkah itu berlaku menurut

wanita. (Mulyana, W. Kusumah, 1986 : 3).

Selanjutnya bertautan dengan sifat kerelatifan seseorang dengan apa yang disebut dalam istilah *figh* sebagai "Baligh". Pada umumnya Ulama' khususnya Sya-fi'iyah menggariskan baligh itu ditandai dengan batas usia maksimal limabelas tahun (15) baik laki-laki maupun perempuan, dan atau kurang dari limabelas tahun akan tetapi sudah pernah bermimpi bagi laki-laki, serta telah mengalami menstruasi bagi perempuan, maka iapun termasuk dalam katagori baligh.

Perlu diketahui bahwa tanda-tanda balig seperti diatas sifatnya relatif. Artinya pengalaman seorang anak dengan lainnya berbeda-beda, tergantung dari faktor intern dan ekstern si anak. Ada diantara mereka yang sebenarnya masih terlalu kecil, namun karena pengaruh lingkungan, maka ia menjadi cepat dewasa dalam pengertian baligh, demikian pula sebaliknya.

Batas usia baligh adalah bukan berarti batas berakhir kekuasaan atau pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini disebabkan karena pada umumnya anak-anak meskipun secara fisik mereka telah baligh, terlepas dari kebalighkannya karena batas usia kesempurnaan atau bermimpi dan haid sebelum limabelas tahun (15),

saan seperti diatas yang memang sangat kondisional serta tergantung dari diri individu masing-masing anak, maka menurut hemat penulis yang dimaksud dengan anak telah dewasa khususnya di Indonesia adalah mereka yang telah mampu berdiri sendiri menurut kebiasaan pada umumnya. Artinya baik ia telah dewasa (baligh) dalam usia limabelas (15) tahun, suatu misal karena ia telah mampu mandiri, maka saat itulah seorang anak dikatakan dewasa, dan berakhirnya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (dalam arti materi), namun demikian mereka yang telah benar-benar lebih dari usia dewasa secara fisik dan mental, namun ternyata juga belum mampu berdiri sendiri, hakekatnya pun telah dewasa dalam relevansinya dengan pencabutan kekuasaan orang tua dalam skripsi ini. Dengan demikian mereka yang telah dewasa dalam pengertian fisik dan mental namun belum mampu berdiri sendiri, adalah sudah tidak berhak atas kekuasaan orang tua, demikian pula sebaliknya orang tuapun tidak berkewajiban memberi apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau orang tua masih senang mengeluarkan tangannya seperti telah penulis dimuka, pemberian disini bukan diartikan pemberian suatu kewajiban, melainkan semata hanya tanggung jawab moral saja, karena di Indonesia sangat erat hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya.

Kesimpulan seperti hemat penulis diatas, didasarkan atas pemahaman, pertama : bahwa pada ghalibnya di Indonesia yang umum berlaku adalah demikian, artinya berdasarkan keumuman adat yang berlaku. Dengan demikian berlaku kaidah ushul yang menjelaskan :

العادة محكمة

(Al Asbah wan Nadhair : 63)

Artinya :

" Kebiasaan itu dapat dijadikan dasar ". (Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuti Al Asbah, 1955 : 64).

Kedua, secara yuridis hukum anak-anak yang telah baligh, terlebih mereka yang lebih dari duapuluh tahun (20) adalah telah mampu untuk berbuat hukum, sebagaimana dapat dipahami dalam hadits Nabi Saw, Yang berbunyi :

رفع عن ثلاثة وعن الصبي حتى يكبر

(Al Jami'us Shaghir, juz II : 16)

Artinya :

" Di na'atkan atas tiga golongan..... atas anak-anak sehingga ia dewasa (besar) ". (H.R. Imam Hakim dan Dawud serta Ibnu Majah).

Dari beberapa penjelasan dan dasar pertimbangan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tentang batas berakhirnya pencabutan kekuasaan orang tua menurut BW terhadap anaknya dalam usia batasan duapuluh satu tahun (21) dan atau sudah kawin, adalah benar menurut hukum

Islam tapi belum sepenuhnya dapat diterima. Dikatakan benar karena pada usia duapuluh satu tahun seseorang memang telah dapat dikatakan dewasa, baik secara fisik maupun mental dengan demikian anak setelah usia tersebut telah dikatakan mampu berbuat hukum sendiri yang oleh Islam disebut baligh. Namun demikian tidak selamanya anak seusia diatas itu sudah mampu berbuat dan mandiri, yang berarti masih menggantungkan dirinya kepada orang tua dalam kehidupannya. Yang paling tepat adalah bahwa anak dikatakan dewasa dalam kaitannya dengan pencabutan kekuasaan orang tua yaitu anak itu telah dewasa dan menurut kebiasaan anak itu telah mampu mandiri, pada saat itulah berakhir kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Dan perlu dijelaskan kembali bahwa dimaksud dengan pencabutan kekuasaan orang tua, sebagaimana penulis utarakan diatas baik menurut BW maupun hukum Islam telah sepakat adanya atau sama bolehnya.